



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRADISI CERAH GUGAT “KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG” DALAM
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT DESA
TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN DI TINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh:

TOMI ANGGARA
NIM: 11621104186

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"TRADISI CERAI GUGAT "KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG" DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN DI TTINJAU MENURUT HUKUM ISLAM"*

Yang ditulis oleh:

Nama : TOMI ANGGARA

NIM : 11621104186

Program Studi : HUKUM KELUARGA (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIK. 19750521 200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul " TRADISI CERAI GUGAT "KAIN SAOLAI TUUN DI MINGGUNG" DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT BESA PANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN BELALAWAN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM " yang ditulis oleh :

Nama : TOMI ANGGARA
NIM : 11621104186
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Sekretaris
H. Syamudin Muir, MA

Penguji
H. Marzuki, MA

Penguji
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tomi Anggara (2020): Tradisi Cerai Gugat “Kain Saolai Tuun di Pinggang” dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat desa Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Hukum Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penulis karena adanya perbedaan antara adat desa Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan dan hukum Islam dalam pembagian Harta bersama. Penyebab terjadinya karena istri menggugat cerai suami dan pihak adat memutuskan istri tidak mendapat apapun. Sedangkan berdasarkan hukum Islam harta bersama harus dibagikan karena terdapat hak antara suami dan istri didalamnya. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Tradisi Cerai Gugat *kain saolai tuun di pinggang* Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi cerai gugat *kain saolai tuun di pinggang* dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi ini dengan menggunakan teknik *total sampling*. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan data kualitatif serta menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan istri tidak diberikan harta bersama ada 3 yaitu: karena kesalahan istri, Kedua, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki dan yang ketiga sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu, dan apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang Tradisi Cerai Gugat “*Kain Saolai Tuun di Pinggang*” dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan hukum islam, karena dalam hukum Islam lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudhoratan yang lebih ringan.

Kata kunci: Tradisi, Perceraian, Harta Bersama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Tradisi Cerai Gugat “Kain Saolai Tuun Di Pinggang” Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Hukum Islam.**

Sholawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Kepada yang tersayang dan tercinta Ayahanda Herman, Ibunda Marina, Abang mardius, dan kak niken lestari, Ponakan pertama M. Ammar firdaus, adik sepupu tersayang Bobi Susanto dan seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu, memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl. selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Spirit* intelektual kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.

Kepada Bapak Irfan Zulfikar.M,Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.

6. Kepada bapak Drs.H.,Mohd.Yunus,M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.

7. Kepada Aulia wulan sari yang telah memberi semangat dan menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.

8. Kepada Yongki Arisandi, S.H. yang telah memberi semangat dan menjadi teman yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada khairul sabri teman baik sejak awal kuliah hingga saat ini.

10. Kepada Abdurahman Aziz harahap, Hanafi, Ansor, Fadlan,Aldi syahputra, Nofriyaldi Edo apriyaldi, dan Desi Ardiyati sahabat sejak awal kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada ibu fatmawati yang telah sangat banyak mensupport dalam proses menyelesaikan skripsi ini .
12. Untuk Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk sahabat-sahabatku terkhusus kepada desi adriati, S.H., Edi Dermawan, Iskandar, Afrizal, Ishak lubis, S.H. Lukman, Nur azmi, S.H., , Hermansyah .S.H ,Islah Ramadan Pangianto .S.H, Harun harasyid. S.H, Risky nurza fajar, Naim, Ikhlas teman-teman HIPMAPALES dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kecamatan siak kecil, yang telah memberikan bantuan selama menempuh pendidikan Strata 1 di UIN SUSKA RIAU.
13. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016, terkhusus kelas B.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis

Tomi Anggara
NIM. 11621104186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Model Penulisan.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Wilayah	17
1. Sejarah desa Tanjung kuyo	17
2. Letak Geografis Desa Tanjung kuyo	19
3. Kependudukan	20
4. Agama dan Pendidikan	21
5. Sosial dan Budaya	23
6. Ekonomi	24
7. Adat Desa Tanjung kuyo	25
B. Kepala Desa	26
C. Sekretaris Desa.....	27
D. Kepala Urusan Pemerintahan.....	28
E. Kepala Urusan Umum.....	29
F. Kepala Urusan Pembangunan	29
G. Kepala Urusan Keuangan.....	30
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT DAN HARTA BERSAMA	
A. Adat.....	31
1. Pengertian ‘Urf (adat)	31
2. Dasaar kehujaahan ‘urf	32
3. ‘urf berdasarkan hukum islam.....	35
B. Harta bersama.....	39
1. Pengertian Harta.....	39
2. Pengertian Harta Bersama.....	41



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

3. Dasar hukum harta Bersama	43
C. Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.....	51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi cerai gugat “ <i>kain soalai tuun di pinggang</i> ” dalam pembagian harta bersamapda masyarakat desa tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi cerai gugat kain saolai tuun di pinggang dalam pembagian harta bersama..	64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah penduduk Desa Tanjung Kuyo	21
Tabel II.2	Jumlah penduduk menurut tingkat umur Desa Tanjung Kuyo.....	21
Tabel II.3	Data penduduk menurut Agama Desa Tanjung Kuyo	22
Tabel II.4	Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tanjung kuyo	22
Tabel II.5	Mata Pencanharian Penduduk Desa Tanjung Kuyo.....	25



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil penting.¹ menurut Syauhi Thalib perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki laki dan seorang perempuan..²

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.³

Kenyataan membuktikan banyak faktor yang memicu keretakan di dalam rumah tangga. Dengan putusya suatu perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi hubungan antara suami dan istri. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah *hadhanah* (hak asuh anak), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, masa *iddah* istri, nafkah istri dan anak, dan harta bersama.

¹ Ibrahim Amini' *priciples Of Marirge Family ethics*, terj. Alwilayah Abdurahman "Bimbingan islam untuk suami istri" (Bandung: al bayan 1999), hal.17

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 47

³ Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003), hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaan terjalin sedemikian eratnyanya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan putusnyanya perkawinan maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi di antara suami dan istri.⁴

Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa barang, uang, hewan, dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh manusia.⁵ Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْئِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ١٤

Artinya : “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta atas apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan tenak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah tempat kembali yang baik.”(Q.S. Ali Imran: 14)⁶

Ayat di atas menyebutkan tentang kecintaan terhadap apa yang diinginkan manusia, salah satunya adalah harta. Menurut Ibnu katsir, cinta kepada harta ada kalanya karna terdorong faktor menyombongkan diri dan berbangga-banggaan, takabur terhdap orang lemah, dan sombong terhadap orang miskin, hal ini sangat dicela. Akan tetapi ada kalanya terdorong karena ingin membelanjakan di jalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan

⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika hukum keluarga islam kontenporer*, (Jakarta:Pradana media group,2010), hal.52

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam 2*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah press, 2014), Ed. 1, cet, 1, hal. 4

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta,CV.Pustaka Jaya Ilmu,2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

silaturahmi serta amal amal kebajikan dan ketaatan hal ini sangat terpuji menurut *syariat*.⁷

Pada dasarnya konsep harta di dalam Islam adalah amanah (titipan) dari Allah manusia hanyalah sebagai pengelola dan pemanfaat terhadap apa yang telah diturunkan dari langit dan apa yang telah dikeluarkan-Nya dari bumi, sedangkan pemilik mutlak atas segala sesuatu tersebut termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanyalah bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuannya.⁸

Pemanfaatan harta dalam Islam merupakan suatu kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi manusia sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi, sedangkan kebahagiaan akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allah sehingga mendapatkan ganjaran *ukhrawi* (surga) dari-nya.⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman didalam AL-Qur'an surat An-Nisa

⁷ Al-Imam Ibn Katsir Al-Dimasyqi, Tafsir Ibn Katssir, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), juz 3, hal. 47

⁸ Akhmad Mujahidin, Op.Cit., hal. 47

⁹ Ibid, hal. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٣٢

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa, ayat 32).¹⁰

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *zaak*, barang adalah terjemahan *good*, dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KUHperdata, pengertian benda meliputi barang dan hak barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud.

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah jadi masing masing memiliki hak untuk membelanjakan hartanya sepenuhnya tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing masing pihak ialah harta bawaan masing masing pihak dalam masa perkawinan dan bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari asalnya ,harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan:

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hal. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta masing-masing suami istri telah dimilikinyaa sebelum kawin, baik diperolehnya karna mendapat *warisan* atau usaha lainnya, dalam hal ini disebut dengan harta bawaan.
2. Harta masing masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan , tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama maupun sendiri-sendiri,tetapi diperoleh seperti *hibah*, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut dengan harta pencharian.¹¹

Dasar hukum tentang harta bersamadapat ditelusuri melalui undang undangan dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,

¹¹ Azni, Ilmu *Fiqh dan Hukum Keluarga presfektif ulama tradisional dan Kontemporer*, (Pekanbaru, uin suska riau 2015), hal. 180-181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”¹²

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.¹³

Mengenai pembagian harta bersama atau gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan.¹⁴

Kemudian dalam pasal 128-129 KUHPdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri.¹⁵

Itulah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Apabila terjadi perceraian maka harta itu harus dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun undang-undang tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat khususnya di desa Tanjung kuyo, kecamatan Pangkalan lesung, kabupaten Pelalawan, Riau,

¹² KUHPdata pasal 119

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 59

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97

¹⁵ KUHPdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), penerbit : Pustaka Mahardika pasal 128-129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang apabila terjadi cerai gugat ,maka harta bersama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada suami dan anak-anaknya.

Dalam istilah adat melayu khususnya di Desa Tanjung Kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada istilah adat “Kain Saolai Tuun di Pinggang” yang secara bahasa atrinya kain sehelai yang diikatkan di pinggang, sedangkan secara istilah memiliki makna seorang wanita yang menggugat cerai suaminya hanya boleh membawa apa yang melekat di badan nya saja, itulah yang boleh ia bawa dan tidak mendapatkan bagian dari harta bersama. Sanksi adat ini diberikan kepada seorang wanita yang pergi meninggalkan rumah atau pulang kerumah orangtuanya dengan alasan ingin menggugat cerai suaminya, karena dimata adat setempat apabila seorang istri menggugat suaminya dengan alasan tertentu di anggap sebagai seorang istri yang durhaka, maka di jatuhkanlah hukuman adat “kain saolai tuun di pinggang”.

Itulah sanksi adat yang diberikan kepada istri yang mengugat cerai suaminya dengan alasan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul Tradisi Cerai Gugat “*Kain Saolai Tuun di Pinggang*”dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi cerai gugat “*Kain Saolai Tuun Di Pinggang*” dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi Kain saolai Tuun Dipinggang dalam Pembagian harta bersama Pada masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *pembagian kain saolai tuun di pinggang* di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung ketika terjadi cerai gugat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kain saolai tuun di pinggang* Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menambah wawasan Tentang Tradisi cerai Gugat kain saolai tuun dipinggang dalam pembagian harta bersama di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan tradisi kain saolai tuun di pimnggang dalm pembagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung ketika terjadi cerai gugat.

2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang pelaksanaan tradisi kain saolai tuun dipinggang dalam pembagian harta bersama di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ketika terjadi cerai gugat dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi kain saolai tuun di pinggang di Desa Tanjung kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan .

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.¹⁶ Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat menacpai hasil maksimal, dalam penelitian skripsi ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari ninik mamak/pemuka adat, kepala desa, dan orang yang telah melaksanakan tradisi tersebut di Desa Tanjung kuyo kecamatan Pangkalan Lesung ketika terjadi cerai

¹⁶ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Peneltian Filsafat*, (yogyakarta : Kanisius, 1999), hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugat lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pembagian harta bersama di desa tanjung kuyo apabila terjadi cerai gugat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis menemukan masalah ini disana dan juga penulis bertempat tinggal disana serta sedikit mengetahui tradisi tersebut .

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian tradisi cerai gugat *kain saolai tuun di pinggang* dalam pembagian harta bersama di Desa Tanjung kuyo kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. terdiri dari ninik mamak/pemuka Adat, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan orang yang telah melaksanakan cerai gugat tersebut.
- b. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah tradisi cerai gugat *Kain solai tuun di pinggang* dalam pembagian harta bersama di desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah ninik mamak/pemuka adat, kepala desa, orang yang telah melakukan cerai gugat tersebut, toko agama dan toko masyarakat Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Populasi dalam penelitian pelaksanaan pembagian harta bersama di desa tanjung kuyo ketika terjadi cerai gugat berjumlah 10 orang yang terdiri dari 3 orang ninik mamak/pemuka adat, 1 orang kepala desa, 4 orang yang telah melaksanakan tradisi tersebut, dan 2 tokoh masyarakat .

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁸

Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁹ Populasi yang ada

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif*, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 215.

¹⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hal. 23

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 10 orang yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁰

Sumber dari primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di desa Tanjung kuyo kecamatan pangkalan lesung ketika terjadi cerai gugat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²¹

Dalam hal ini yang dipergunakan adalah buku-buku yang mampu mendukung penelitian penulis.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4, hal. 106.

²¹ *Ibid.*, hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan tambahan sumber data primer dan sumber data sekunder.²² data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia, jurnal serta makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa tanjung kuyo kecamatan Pangkaalan lesung untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hal. 114

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁴

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian harta bersama di desa tanjung kuyo kecamatan pangkalan lesung ketika terjadi cerai gugat.

c. Studi Kepustakaan

Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.²⁵

d. Dokumentasi

Dokumen yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.²⁶

7. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis deskriptif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh adat yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 138.

²⁵ Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14.

²⁶ Juliansyah, *Op. Cit.*, hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dilapangan secara konkrit serta menyusun, menjelaskan dan dianalisa.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahsan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang sekilas sejarah biografis, kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosiologis Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HARTA BERSAMA

Pada bab ini membahas tentang ruang lingkup hukum di Indonesia, pengertian harta bersama, pembagian harta bersama menurut hukum Islam.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang pelaksanaan Tradisi cerai gugat “kain saolai tuun dipinggang” di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan bagaimana tinjauan menurut Hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Wilayah

1. Sejarah *Desa Tanjung Kuyo*

Nama Desa Tanjung diambil dari dua kata yakni Tanjung dan Kuyo, Tanjung artinya adalah tempat bermuara atau berlabuh pompong/*sampan*(perahu) pada masa dahulu, terletak di ujung Desa Tanjung kuyo saat ini, yang tepatnya termasuk dalam wilayah sungai kerumutan, karna pada saat itu yang menjadi transportasi adalah jalur air dan orang orang yang singgah kesana menyebutnya dengan Tanjung. Sedangkan Kuyo diambil dari nama salah satu sungai pembatas antara tanah adat kebatinan tanah napuh dan tanah panduk yang terletak ujung kampung sebelah kanan.

karena Desa Tanjung kuyo diapit oleh dua sungai yakni sungai kerumutan dan sungai kuyo, diambilah nama Tanjung yang lebih dikenal orang pada saat itu saat itu dan digabungkanlah nama kuyo maka terbentuklah nama Tanjung dan kuyo, yang menjadi nama dusun pada saat itu yakni Dusun Tanjung Kuyo.²⁷

Desa Tanjung Kuyo merupakan sebuah dusun yang ada di Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya juga termasuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar, sebelum *Desa Tanjung Kuyo* berstatus desa,

²⁷ Wawancara dengan datuk Nasar selaku ninik mamak dari suku paneling Desa Tanjung kuyo



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Kuyo merupakan suatu wilayah perdusunan yang bernama Dusun Tanjung Kuyo.

Setelah proklamasi kemerdekaan indonesia di proklamirkan pada tanggal 17 agustus 1945 maka tanggal 28 oktober 1945, raja pelalawan terakhir menyatakan kerajaan pelalawan meleburkan diri kedalam negara kesatuan republik indonesia maka perdusunan Tanjung Kuyo secara otomatis juga masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia. *Desa Tanjung Kuyo* dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor : kpts.141/pem/2009/122 tentang pemekaran dan perubahan status dusun menjadi desa di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Pada tanggal 16 maret 2009 Dusun Tanjung Kuyo di resmikan oleh bupati pelalawan menjadi *Desa Tanjung Kuyo* dengan luas wilayah 2.898 km², yang saat ini dengan jumlah penduduk 1028 jiwa yang terdiri dari 3 (tiga) dusun, 3 (tiga) rukun warga dan 9 (sembilan) rukun tetangga, *Desa Tanjung Kuyo* dikepalai oleh kepala desa yang bernama Syataria, beliau merupakan kepala desa perdana dan sebagai kepala desa terpilih.²⁸

2. Letak geografis

Desa Tanjung Kuyo terletak di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan daerah berupa daratan. Desa Tanjung Kuyo terletak dijalur Katulistiwa dengan iklim panas memiliki kondisi Geografis pada ketinggian 10–15 Meter dari permukaan laut dengan

²⁸ Arsip kantor Desa Tanjung kuyo dari Sekretaris Desa Tanjung Kuyo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur tanah dataran tinggi serta sebagian dataran dengan Kondisi kering berbukit dengan kondisi curah hujan 5,582,5 Mm / Tahun.

Keadaan alam yang demikian membuat masyarakat hanya menggantungkan kehidupan pada sector perkebunan kelapa sawit dan ada beberapa masyarakat yang berkebun karet, karena untuk bercocok tanam palawija atau hortikultura tidak mendukung. Masyarakat petani yang dulunya mengutamakan bercocok tanam jenis tanaman seperti padi, jagung atau pangan kini sebagian besar berubah komoditi tanaman perkebunan. Desa Tanjung Kuyo memiliki luas ± 3.265 Ha, yang terdiri dari perkebunan kelapa Sawit, pemukiman penduduk, dan tanah Fasilitas Umum desa lainnya.

Desa Tanjung Kuyo secara geografis merupakan daratan. Sarana transportasi menggunakan jalan desa dan jalan perkebunan yang mana saling terhubung dengan desa-desa lainnya. Aksesibilitas menuju ke Ibukota Kecamatan kurang Lebih 30 Km, sedangkan untuk ke Ibukota Kabupaten Kurang lebih 90 Km dan ke Ibu Kota Propinsi Sekitar 160 Km.

Adapun batas-batas wilayah *Desa Tanjung Kuyo* adalah sebagai berikut :

- a. Utara berbatas dengan sungai kerumutan
- b. Selatan berbatas dengan sungai genduang
- c. Timur berbatas dengan desa genduang
- d. Barat berbatas dengan desa pangkalan tampoi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi Wilayah *Desa Tanjung Kuyo* dengan luas 2,898 km² dan jika di presentasekan lebih 95% merupakan wilayah dataran dengan mencakup 3 (tiga) dusun, 3 (tiga) rukun warga dan 9 (sembilan) rukun tetangga yang terbagi atas beberapa karakteristik yaitu : adanya daerah aliran sungai dan daerah terpencil di beberapa rukun warga sehingga bila musim hujan dijumpai adanya kondisi jalan yang sulit untuk di tempuh.

Disisi lain *Desa Tanjung Kuyo* juga pada musim kemarau sangat memperhatikan karena pada musim ini jalan-jalan berdebu sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya system pernafasan, kondisi ini memang bertolak belakang dengan kondisi wilayah yang berada di daerah dataran, semua ini akibat dari kondisi jalan yang belum dilakukan pengerasan oleh pemerintah daerah maupun oleh PT. Metco energi dan PT.SLS. Pada kondisi ini *Desa Tanjung Kuyo* berada di jalan PT. Metco energi (jalan perusahaan) yang panjangnya lebih 2,34 km mulai dari batas desa genduang sampai batas desa pangkalan tampoi.²⁹

3. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Tanjyng kuyo menurut data terakhir yang penulis temukan adalah 1028 jumlah kepala keluarga yakni 315 (KK) Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

²⁹ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah penduduk
Desa Tanjung Kuyo

No	Penduduk	Jumlah jiwa	Jumlah
1	penduduk laki-laki	628	1028
2	penduk perempuan	400	
3	Penduduk usia produktif	895	1028
4	Penduduk usia non produktif	133	

Sumber: Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo

Tabell II.2
Jumlah penduduk menurut tingkat umur
Desa Tanjung Kuyo

No.	Kelompok umur	Laki-laki(jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	0-1 Tahun	11	7	18
2	1-5 Tahun	37	26	63
3	5-12 Tahun	63	38	101
4	12-17 Tahun	76	43	119
5	17-35 Tahun	186	63	249
6	35--45 Tahun	136	120	256
7	45-60 Tahun ke	102	94	196
8	60 tahun ke atas	17	9	26
Total		628	400	1.028

Sumber: Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo

4. Agama dan pendidikan

Kehidupan keagamaan di jamin oleh negara , sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Data penduduk menurut Agama
Desa Tanjung Kuyo

No	Agama	Jumlah(jiwa)	Presentase
1	Islam	1008	98.05
2	Kristen	20	1.95
Total		1.028	100.00

Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Desa Tanjung Kuyo menurut agama yang paling banyak adalah beragama islam sebanyak 1.008 jiwa/98,05%, sedangkan sisanya beragama kristen sebanyak 20 jiwa/1,95 %. Sedangkan sarana ibadah di Desa tanjung kuyo terdapat 1 masjid dan 2 musolah.³⁰

Tabel II.4
Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Tanjung kuyo

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Presentase
1	Tidak sekolah	45	33	78	7.59%
2	Belum sekolah	24	11	35	3.40%
3	TK	24	18	42	4.09%
4	SD	78	55	133	12.94%
5	Tidak Tamat SD	61	36	97	9.44%
6	Tamat SD	64	32	96	9.34%
7	SLTP	77	38	115	11.19%
8	Tidak tamat SLTP	62	56	118	11.48%
9	Tamat SLTP	44	22	66	6.42%
10	SLTA	27	19	46	4.47%
11	Tidak tamat SLTA	53	51	118	10.41%
12	Tamat SLTA	33	14	50	4.84%
13	PT/Akademi	15	11	23	2.25%
14	Tidak tamat PT	-	-	-	0.00%
15	Tamat PT/Akademi	15	10	25	2.26%
Total		628	400	1,028	100%

Sumber:Dokumen kantor Desa Tanjung Kuyo

³⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa warga Desa Tanjung Kuyo yang paling banyak adalah sekolah dasar (SD), yaitu sebanyak 299 jiwa/12,94 %, sedangkan yang paling sedikit adalah tamat PT/Akademi, yaitu sebanyak 25 jiwa/ 2.26%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Di Desa Tanjung Kuyo masih cukup rendah.³¹

Sedangkan sarana pendidikan hanya terdapat 1 Tk, 1 SD, 1 MDA dan 1 MTS, dengan demikian sarana ibadah sudah bisa disebut sudah memadai dan sarana pendidikan masih kurang memadai karena belum ada SMA/pun yang sederajat di Desa Tanjung Kuyo.

5. Sosial dan Budaya

Secara sosial warga masyarakat Desa Tanjung Kuyo masih mempunyai budaya gotong royong, keterlibatan kaum wanita sudah cukup baik, ini terlihat dari kebebasan kaum wanita untuk mencapai pendidikan tertinggi. Kaum wanita aktif dalam organisasi melalui PKK.

Kegiatan sosial di desa ini meliputi kegiatan gotong royong pembersihan dan perbaikan jalan, gotong royong pembersihan dan perbaikan tempat ibadah, gotong royong dalam melaksanakan pesta pernikahan, gotong royong dalam penyelenggaraan jenazah, dan gotong royong dalam kegiatan keluarga seperti gotong royong mendirikan rumah. Dan juga kegiatan arisan yang dilakukan pada

³¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan kemasyarakatan baik di kalangan ibu-ibu ataupun bapak.³²

Ragam Budaya Masyarakat Penduduk Desa Tanjung Kuyo yang berasal dari seluruh wilayah yang ada di Negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda, telah melahirkan banyak organisasi dan seni budaya. Penduduk Desa Tanjung Kuyo terdiri dari 4 suku yaitu suku Jawa, suku Melayu, suku Batak dan suku Minang. Namun karena mayoritas penduduk desa ini adalah suku Melayu, sehingga budaya Melayu lebih dominan dari budaya suku lainnya.

Walaupun terdiri dari beberapa suku, ras dan agama, sampai saat ini tidak ada kasus RAS yang terjadi, karena masyarakatnya baik pendatang maupun penduduk tempatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan.

6. Ekonomi

Dalam kehidupan di dunia ini faktor ekonomi mempunyai peranan penting, berhasil atau tidaknya kehidupan seseorang sebagian besar ditentukan oleh faktor ekonomi. Dilihat dari dahulu sampai sekarang perkembangan ekonomi masyarakat memiliki perkembangan yang sangat bagus.

³² Wawancara dengan bapak Zulkarnain Sekdes Tanjung Kuyo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Tanjung kuyo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani³³ dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 5
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Kuyo

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani sawit	650 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	20 orang
3.	Pedagang	73 orang
4.	Wirasuwasta	85 orang
5.	Tidak bekerja	200 orang
Jumlah		1.028 orang

Sumber: *Dokumen Kantor Desa Tanjung kuyo*

Dengan demikian, Desa Tanjung kuyo yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan Propinsi Riau, yang berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Dari awal berdirinya sampai sekarang ini, sudah banyak perkembangan atau kemajuan, baik dari segi jumlah penduduk, kepemimpinan, sosial ekonomi, pendidikan maupun tempat ibadah.

7. Adat Tanjung Kuyo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “adat” didefinisikan sebagai aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan. Adat di dalam masyarakat Tanjung kuyo sangat di di pertahankan, seperti salah satu peribahasa berikut: “*Dimano sangketo tumbuh disitu sangketo sudah, dimano*

³³ Arsip kantor Desa Tanjung Kuyo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tamilang dicacak disitu ubi baisi” artinya dimana permasalahan datang disitu pula lah diselesaikan masalah. Adat yang dipakai dalam masyarakat Tanjung Kuyo mempunyai beberapa konsep dalam lingkup adat istiadat, yaitu: Adat yang sebenar adat³⁴, adat yang di adatkan³⁵, adat yang teradat³⁶, adat istiadat³⁷, dan adat mufakat³⁸.

B. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan peneyelenggara pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang

³⁴ Adat yang sebenar adat adalah adat asli dalam bentuk hukum-hukum alam, tidak dapat dirubah oleh akal pikiran dan hawa nafsu manusia.

³⁵ Adat yang diadatkan adalah hukum, norma atau buah pikiran leluhur manusia yang piawai, yang kemudian berperan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia.

³⁶ Adat yang teradat adalah aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa, seperti nama panggilan yaitu iyah, bapak, bah, emak, abang, wo, ngah, do, cek, teh, ndak, ngku, datuk, no, nek, dan yang. *Ibid*, h. 6.

³⁷ Adat istiadat adalah Ketentuan perilaku yang sebaiknya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, karena ketentuan segala sesuatu yang dipandang baik maka telah dikekalkan, sehingga menjadi adat resam (hukum adat) masyarakat Baturijal. Adat istiadat mengatur hubungan manusia dengan alam, adat istiadat ialah adat tradisi dengan segala ragam kerena pelaksanaan serta peralatan.

³⁸ Adat mufakat adalah dalam melaksanakan suatu hal yang berhubungan dengan adat hendaklah terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah, dalam mufakat adat sangatlah memperhatikan azas mufakat baik atau buruknya sesuatu yang akan diputuskan nanti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam Desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.³⁹

C. Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris Desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris Desa dan keadaan umum Desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja Desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.

³⁹ Arsip Kantor Desa Tanjung Kuyo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

D. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik Desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi Desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

F. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di Desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di Desa.
3. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi:

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala Desa
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh Desa
4. Melakukan administrasi keuangan Desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ADAT DAN HARTA BERSAMA

A. 'Urf (Adat)

1. Pengertian 'Urf (Adat)

Kata adat dan 'urf termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur *ushul fiqh* keduanya berasal dari bahasa Arab. Dan bahkan kata 'adah sudah menjadi kata serapan di dalam bahasa Indonesia yaitu adat.

Kata 'urf merupakan derivasi dari kata 'arafa-ya'rifu (عَرَفَ - يَعْرِفُ) atau biasa juga disebut dengan kata *al-ma'ruf* (المَعْرُوف) artinya sesuatu yang dikenal. Artinya sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan meninggalkan.⁴²

Adapun kata 'adat juga berasal dari bahasa Arab yaitu "عَادَةٌ" merupakan derivasi dari kata 'ada-ya'udu (عَادَ - يَعُوذُ) artinya perulangan. Oleh karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat. Dan perulangan adat itu dilakukan baru bisa disebut adat tidak ada ukurannya dan banyaknya, tergantung pada perbuatan yang dilakukan tersebut.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet Ke-1, h.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila diperhatikan kedua kata tersebut di atas penggunaan dan akar katanya terlihat ada perbedaannya yaitu: kata '*adah*' hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Dan kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dinilai dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*' tersebut, karena mereka mengatakan bahwa dua kata tersebut *mutaradif* (sinonim). Akan tetapi jika kita analisa kembali pengertian dari dua kata tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dua kata tersebut saling berkaitan dan tidak ada perbedaan di antaranya secara prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang kali dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, dan sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang.⁴³

2. Dasar Kehujahan '*Urf*'

Para *ulama' ushul fiqh* sepakat bahwa '*urf*' yang tidak bertentangan dengan *syara'* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum *syara'*, baik '*urf*' itu bersifat umum atau khusus, baik '*urf*' itu berupa perkataan ataupun perbuatan.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Jilid 2, Cet Ke-4, h. 410-411



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Menurut Imam Al-Syatibi dan Imam Ibnu Qayyim bahwa seluruh *ulama* mazhab menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil *syara*' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁴⁴

Oleh karena itu maka '*urf* yang *shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dalam peradilan. maka seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Dan seorang hakim harus pula memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu itu telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena tu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara*', maka wajib diperhatikan sebagaimana *syara*' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya.⁴⁵

Para *ulama*' juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah Saw juga banyak

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet Ke-III, h.142

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Op.Cit.*, h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali yang mengakui eksistensi 'urf yang berlaku di tengah masyarakat seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan. Adapun dasar *kehujjahan* 'urf dari *nash* yaitu sebagai berikut :⁴⁶

a) Hadis Nabi

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.*⁴⁷

b) QS. Al-Hajj ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan agama.*⁴⁸

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama *ushul fiqh* juga merumuskan kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya adalah yang paling mendasar :

1. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*⁴⁹

2. تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

⁴⁶ H. A. Djazuli Dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet Ke-1, h. 186

⁴⁷ Muhammad bin Yazid, *Op.Cit.*, h. 705

⁴⁸ Departemen RI, *Op.Cit.*, h.341

⁴⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), Cet Ke-3, h. 140



*Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.*⁵⁰

3. المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*Sesuatu yang telah dikenal secara 'urf adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.*⁵¹

4. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.

Para ulama *ushul fiqh* juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf' bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.⁵²

3. 'Urf Berdasarkan Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut dengan adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan *muamalah* yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi

⁵⁰ *Ibid.*, h. 145

⁵¹ Abbas Arfan, 99 *kaidah fiqh muamalah kulliyah*, (Malang: Uin-Maliki Pres, 2013), Cet-2, h.61-65

⁵² Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.142-143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan dengan umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara adat dan *syariat* tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara ke duanya.

Abu Sunnah menyatakan bahwa Sesungguhnya pra syarat minimal keberlakuan '*urf*' hanya ada dua syarat yaitu: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa '*urf*' harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar '*urf*' dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan '*urf*' yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Akan tetapi Islam hadir dengan keadaan menyeleksi '*urf*' yang ada, jika tidak bertentangan dengan Islam, maka '*urf*' tetap dijalankan. Akan tetapi jika sebaliknya, maka Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.



Secara historis, akomodasi *'urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa *'urf* pada masa sebelum Nabi Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad seringkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini diistilahkan di dalam hadis dengan istilah sunah *taqririyah*. Ini artinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka Nabi Muhammad terlebih dahulu mengakomodasi *'urf* yang ada di Arab. Karena Nabi Muhammad sadar bahwa *'urf* ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru dapat dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.⁵³

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok yaitu :

1. Adat yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya. Atau dengan kata lain bahwa unsur manfaatnya lebih besar dari pada unsur mudharatnya. Adat seperti ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh hukum Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam,

⁵³ M. Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Jember, 2016), volume 20, h. 68-69

namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

3. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* dan tidak mengandung unsur maslahat atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakanya lebih besar, maka adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.
4. Adat yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'* baik secara langsung ataupun tidak, maka adat seperti ini jumlahnya sangat banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikategorikan bahwa '*urf*' yang pertama dan kedua merupakan '*urf*' yang *shahih* yang wajib dipelihara. Sedangkan '*urf*' yang ke tiga di sini tergolong kepada '*urf*' yang *fasid* atau rusak dan tidak wajib untuk dipelihara. Dan '*urf*' yang ke empat di atas masih menjadi perbincang oleh para '*ulama'*'. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di sumber rujukan penulis.⁵⁴

Para '*ulama'*' yang mengamalkan '*urf*' di dalam menetapkan suatu hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut yaitu :

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 416-418



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. 'Urf' itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. 'Urf' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. 'Urf' telah berlaku pada saat itu, bukan 'Urf' yang muncul dikemudian hari.
4. 'Urf' tersebut tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa adat digunakan sebagai landasan menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama *adat* atau '*urf*' sebab *adat* atau '*urf*' itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri akan tetapi *adat* atau '*urf*' itu menjadi dalil karena ada yang mendukungnya atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat dan telah berlangsung lama berarti telah diterima secara baik oleh umat. Jika ulama telah mengamalkannya berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung maslahat. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, h. 424-426



B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “ Harta dapat berarti barang-barang yang menjadi kekayaan berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya mempunyai nilai”.⁵⁶

Hasby Ash-Shiddieqy memberikan pengertian bahwa harta adalah sesuatu yang berharga yang bersifat materi yang beredar antara manusia.⁵⁷

Selanjutnya Hasby Ash-Siddieqy merumuskan sebagai berikut:

1. Harta atau Mal adalah nama setiap sesuatu (dalam hal ini manusia tidak termasuk), yang ditetapkan untuk keselamatan, dapat dipelihara suatu tempat serta dapat dilakukan dengan jalan ikhtiar.
2. Benda yang dijadikan harta itu dapat berlaku secara umum dikalangan masyarakat.
3. Harta itu harus bewujud, karena itu manfaat harta atau jasa tidak termasuk harta.
4. Harta itu dapat disimpan pada waktu tertentu.⁵⁸

Menurut bahasa, pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi harta kekayaan.⁵⁹ Para ahli hukum Islam memberikan pengertian harta (*al-maal*) adalah nama bagi selain manusia

⁵⁶ Azni, *Op.Cit.*, hal. 180

⁵⁷ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hal. 142

⁵⁸ *Ibid*, hal. 140

⁵⁹ Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1989), cet.2, hal. 199

yang ditetapkan untuk kemashalatan manusia, dan dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan biasa. Demikian menurut Zainuddin Ibnu Nujaim dalam buku Bahrur Raiq.

Menurut Ibnu Abidin dalam buku beliau Abdul Mukhtar dapat disimpulkan bahwa harta adalah sesuatu yang dapat disimpan lama dan dapat di pergunakan di waktu yang di perlukan.⁶⁰

Dalam pada itu ulama Hanafiyah memberikan batasan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan dapat diambil manfaatnya menurut cara yang biasa.⁶¹ Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti yang dinyatakan oleh As-Suyuti, bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan mesti dibayar ganti rugi jika berlaku kerusakan. Sebahagian ulama Maliki berpendapat sesuatu yang boleh dinamakan sebagai '*mal*' adalah yang digunakan oleh pemiliknya saja jika diperolehinya dengan cara yang betul. Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, harta (*mal*) adalah merujuk kepada nama bagi himpunan sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Namun golongan yang selain dari mazhab Hanafi menganggapnya sebagai harta Karena maksud atau tujuan benda adalah manfaatnya bukan zatnya. Inilah pendapat yang *shahih* yang digunakan oleh undang-undang dan diterima oleh orang ramai dalam urusan mereka.⁶²

⁶⁰Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hal. 9

⁶¹ Wahbah al Zuhayly, *al fiqh al Islami wa'adillatuhu*, Juz IV Daru Al fikri, Damsyik, 1989, hal. 40

⁶²*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian, dapat diringkaskan bahwa harta dari sudut undang-undang Islam adalah setiap sesuatu yang boleh dikuasai, dimanfaatkan dan halal menurut ketetapan *syarak* serta mempunyai nilai disamping manusia cenderung kepadanya.

2. Pengertian Harta Bersama

Menurut R. Soebekti, dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung” mengatakan, yang termasuk gono – gini adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa : harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.

Abdul Kadir Muhamma, dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa, “ konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu dengan yang lainnya”. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.⁶³

Didalam bukunya Drs.Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum, mengatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa ada yang mempersoalkan

⁶³ Azni, *Op.Cit.*, hal. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdaftar atas nama siapa." Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁶⁴

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁶⁵

Dalam kitab-kitab *fiqh* tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *Nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, tanpa *akad* tersebut harta tetap terpisah.⁶⁶

Bila dalam majelis *akad* nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami istri menjadi harta bersama. dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk : Pertama, adanya *akad syirkah* antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya *akad* atau

⁶⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.104

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 161

⁶⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.181

sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya *akad*.⁶⁷

3. Dasar Hukum Harta Bersama

a. Harta bersama menurut KHI

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97.

Pasal 85

menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1) Menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86
- (2) Mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87

⁶⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 121-122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya.

Pasal 88

menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri dan mereka berhak menguasai harta masing-masing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain. Pasal 96 terdiri dari dua ayat :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁸

Harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 terdapat dalam bab VII pasal 35, 36, 37 sebagai berikut:

- 1) Pasal 35:(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) harta bawaan dari masing masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 2) Pasal 36: (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan keduaabelah pihak.
(2) mengenai harta bawaan suami masing-masing dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.
- 3) Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶⁹

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974: tentang perkawinan dan kompilasi Hukum islam,(Bandung:citra:umbara 2007) hal. 47-56 dan 268-270

b. Harta Bersama Menurut Adat

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*.

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- 3) Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- 4) Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.⁷⁰

Indonesia yang mempunyai daerah yang sangat luas, memberikan adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan

⁷⁰ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1974), hal. 221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta bersama sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Hal ini bisa dilihat di daerah Jawa disebut *gono gini*, di Aceh disebut harta *seuhareukat*, di Bali disebut harta *druwe*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Madura disebut *ghuma-ghuma*, dan di Sulawesi Selatan disebut barang *cakkara*.⁷¹

Oleh karena perbedaan itulah, di Indonesia maka didalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 diadakan pasal 37 yang berbunyi “ bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”⁷²

c. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Konsep harta gono gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian Fiqih (Hukum Islam) klasik, Fikih Islam Klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama ulama terdahulu sebelum masa moderen. Para ulama tersebut mendefenisikan Fiqh Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan Rasulullah Saw.⁷³

Harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum yang belum terpikirkan (*ghair al mufakkar fih*). Sebab, isu harta

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hal.107.

⁷² Ismuha, *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 43

⁷³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 30



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama lebih banyak berkembang dan penting untuk dibicarakan pada masa modern ini. Sesungguhnya masalah harta bersama tetap dalam kajian hukum Islam. yang mana analisis untuk mengkajinya melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* terhadap produk hukum Islam yang sudah ada sebagai perbandingan.⁷⁴

Kajian tentang harta bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta bersama itu termasuk kedalam konsep *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari bahasa arab, yang artinya bersama-sama atau berpartisipasi didalamnya, dapat juga diartikan menjadi sekutu atau serikat. Jadi secara bahasa *syirkah* adalah suatu bentuk percampuran atau kerjasama. *Syirkah* secara global menurut para *Fuqaha* ada empat macam, yaitu *Syirkah I'nan*, *Abdan*, *Mufawadhah*, dan *Wujuh*.⁷⁵

Dasar hukum mengenai *syirkah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat *Shad* ayat 24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَضَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya

⁷⁴ Happy Susanto, *Pembagian harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal. 49

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid tahrij Ahmad Abu Almajdi*, terjemahan kitab hal.496



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."⁷⁶

Dalam Islam adapun *Hadist Qudsi* mengenai syirkah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا⁷⁷

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Dawud).

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Mengatakan bahwa sanad ini *shahih*. Arti hadis ini adalah bahwa Allah swt akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam pengawasannya, penjagaannya, dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu keduanya telah berkhianat maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak meninggalkan berkah dan

⁷⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, 24

⁷⁷ Syaikh Zakaria Anshary, *Syarhu 'l-bahjah jilid III, Mathba'ah Maimaniyah*, hal.166. lihat juga Muhammad Ar-Ramly, *Nihayatu 'l'Muhtaj* jilid V hal.2 dan juga Hasyiah *Al'Allamah Al-Haj Ibrahim 'Ala Al-Anwaari Li A'maali Al-Abraar* jilid I hal.317 (bil haamisy).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Kemudaaian Allah swt melarang untuk memakan harta orang lain sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* (Surah Al-Baqarah ayat 188)⁷⁸

Pada Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, ghosob, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun.⁷⁹ Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.⁸⁰

C. Hak dan Kewajiban suami istri

Hak dan Kewajiban suami istri dalam berumah tangga, yaitu:

- a. Mempergauli dengan baik
- b. Menaati selama dalam hal ma'ruf
- c. Selalu menjaga keharmonisan baik suami maupun istri

⁷⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, hal. 58

⁷⁹ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1993), hal. 225.

⁸⁰ Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 367 dan 390.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Selalu menjaga rahasia rumah tangga
- e. Mengatur urusan rumah tangga dan pendidikan anak
- f. Memberikan nafkah lahir maupun bathin
- g. Saling membantu dalam menjalankan tugas dalam rumah tangga
- h. Memelihara, mengasuh, dan mendidik anak sebaik-baiknya

Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin.
- b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina
- c. menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir batin.
- d. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan.
- e. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang utuh, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Artinya dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan

tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga sakinah, setidaknya-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.⁸¹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 64-65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan apabila terjadi cerai gugat maka istri tidak mendapat apapun dari harta bersama, kecuali pakaian yang ia pakai saat itu atau dikenal dengan Istillah "*Kain Saolai Tuun di Pinggang*". Ada 3 faktor yang menyebabkan istri tidak mendapatkan harta bersama ketika terjadi cerai gugat menurut hukum adat di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan. Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri. Kedua, Disebabkan gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki dan yang ketiga sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak zaman nenek moyang dahulu.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang Tradisi Cerai Gugat "*Kain Saolai Tuun di Pinggang*" dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan bahwasannya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena memberikan kemaslahatan yang lebih besar dibanding kemudhorattannya.

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemuka adat/ninik mamak memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di desa Tanjung kuyo kecamatan Pangkalan Lesung, kabupaten Pelalawan, baik dalam muayawara ataupun dalam kegiatan tertentu lainnya.
2. Kepada ninik mmamak diharapkan membuat suatu ketentuan hukum yang tertulis yang telah diepakati oleh seluruh ninik mamak sepersukuan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat setempat dan dapat diketahui oleh khalayak ramai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEPUSTAKAAN

Abbas Arfan, *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah*, Cet-2 (Malang: Uin-Maliki Pres, 2013)

Abd. Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008)

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1993,

Abdurrahman Fathoni, 2011 *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-maragi, terj. Bahrin abu bakar dan Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi Cet ke-2 (Semarang: PT. karya Toha Putra Semarang, 1993)

Ahmad Rafie Baihaqy, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi islam* 2, 2003 Pekanbaru: Al-Mujtahadah pers

Al-Imam ibn katsir al-dimasyqi, 2000 Tafsir ibn katssir, Bandung: Sinar Baru Algesindo

Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1993)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, 1999 *Metode Peneltian Filsafat*, yogyakarta : Kanisius

Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Azni, *Ilmu fiqh dan hukum keluarga presfektif ulama tradisionalis dan kontemporer* Pekanbaru, uin suska riau 2015

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003)

Burhan Bungin, 2007 *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Departemen Agama RI, 2014, Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta, CV. Pustaka Jaya Ilmu

Emzir, 2010 *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

H. A. Djazuli Dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2006)

Happy Susanto, *Pembagian harta Gono-Gini saat terjadi perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008)

Happy Susanto, 2005 *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian Bandung: Alumni*

Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Hasby Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987)

Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999),

Ibrahim Amini, *principles Of Marirge Family ethics*, terj. Alwilayah Abdurahman” bimbingan islam untuk suami istri” Bandung: al bayan 1999

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)

Ismuha, *Pencarian Bersama suami isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Intruksi presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 pasal 97

KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerbit : Pustaka Mahardika pasal 128-129

KUHPerdata pasal 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

M. Noor Harisuddin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, (Jember, 2016), volume 20

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016)

Mochamad Djais, 2003 *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang:

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqiyah*, Cet Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Muhammad Ma'shum Zein, Amin Syukur, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jombang : Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006)

Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

Satria Effendi M.zein, 1991 : 5

Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thaho, (Bandung: Al-Ma'arif, 1966)

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT RenikoCipta, 1992)

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Keantitatif Kualitatif*, dan R&D, Bandung: Alfabeta

Suharsimi Arikunto 1998, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Syaikh Zakaria Anshary, *Syarhu 'l-bahjah jilid III, Mathba'ah Maimaniyah*

Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1974)

Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika 2007)

Zainudin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Anita Purnama Sari sebagai istri yang menggugat cerai suami Pada Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 10:09 Wib



Wawancara dengan Bapak Asmadi, S.E selaku suami yang digugat cerai istri pada Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 11:11 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Datuk Imun selaku ketua ninik mamak dari suku palabi

Pada Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 17: 40 Wib



Wawancara dengan Datuk Tongkang selaku ketua ninik mamak dari suku mangkuto Pada Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 20:06 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Syatria selaku kepala desa Tanjung kuyo Pada
Tanggal 17 Juli 2020 Pukul 20: 30 Wib



Wawancara dengan Ibu Sunarti selaku istri yang menggugat cerai suami
Pada Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 12 : 22 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Datuk Nuar selaku ketua ninik mamak dari suku sungai modang Tanggal 18 Juli 2020 Pukul 20 : 51 Wib



Wawancara dengan Bapak Suanto, S. Ag selaku tokoh masyarakat Pada Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 11 : 07 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak M Guntur selaku suami yang digugat cerai istri
Pada Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 12 : 19 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak H. Herman selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung kuyo Pada Tanggal 19 Juli 2020 Pukul 14 : 05 Wib

PEDOMAN WAWANCARA

4. HARTA BERSAMA (*KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG*)

SEJARAH KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG

KAPAN TRADISI PEMBAGIAN KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG INI DIMULAI?

MENGAPA ISTRI HANYA DIBERIKAN KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG?

BAGAIMANA TANGGAPAN BAPAK TERHADAP KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT?

5. SIAPA YANG MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (*KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG*) KETIKA ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI?

UIN SUSKA RIAU

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING



IRFAN ZULFIKAR, M.Ag.
197505212006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, "TRADISI CERAI GUGAT "KAIN SAOLAI TUUN DI
"PANGGUNG" DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT
LEBAH ANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN
PEKANBARU DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh :

Nama : TOMI ANGGARA
NIM : 11621104186
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di munaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua :
H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Sekretaris :
H. Syamuddin Muir, MA

Penguji I :
H. Marzuki, MA

Penguji II :
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPSTSP/2020/0086

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Mandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 504/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/33366 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

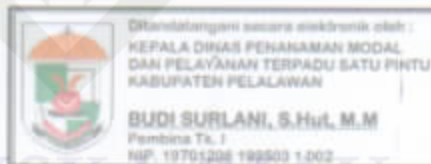
1. Nama : **TOMI ANGGARA**
2. NIM / KTP : **11621104186**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **JL. OLAH RAGA**
6. Judul Penelitian : **KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 15 Juli 2020



Tembusan :

1. TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU DI PEKANBARU
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33366
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Penunjukan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
 009/PP.009/3691/2020 Tanggal 23 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : TOMI ANGGARA |
| 2. NIM / KTP | : 11621104186 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KAIN SAOLAI TUUN DI PINGGANG DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : TANJUNG KUYO KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juni 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan

UIN Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Bengala Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TOMI ANGGARA

NIM : 11621104186

Program Studi: HUKUM KELUARGA

Judul : *Tradisi Cerai Gugat "Kain Saolai Tuun Di Pinggang" Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Desa Tanjung Kuya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Menurut Hukum Islam*

Pembimbing : Irfan Zulfikar.M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Agustus 2020

Impian Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh seorang putra Melayu dari desa Tanjung Kuyo, Kecamatan pangkalan lesung kabupaten Pelalawan. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari pasangan ayahanda Herman dan ibunda Marina. Kakak pertama bernama Mardius.

Penulis lahir di desa Tanjung Kuyo pada bulan November tahun 1997. Mengawali pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri 003 genduang, lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah miftahul ulum Tanjung Kuyo, lulus tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah ummatan wasatan Pesantren Teknologi Riau, lulus tahun 2016. Pada tahun yang sama, penulis diterima di jurusan Hukum Keluarga Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam beberapa organisasi internal kampus dan external. Dimulai dari tahun 2017-2018 sebagai Anggota bem fasih dan kapid di Hmj Hukum keluarga ditahun yang sama penulis juga tergabung sebagai kader HMI 2019-2020 tergabung pula di paguyuban HIPMAPALES (himpunan pelajar dan mahasiswa Pangkalan Lesung) dan diberi amanah sebagai Wakil ketua.

Penulis menjalani Proagram Kerja Lapangan di pengadilan Agama Pekanbaru. Kemudian dilanjutkan dengan Program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) di Desa Tanjung belit Kecamatan siak kecil pada tahun 2019.

Pada tanggal 10 Agustus 2020, penulis dinyatakan LULUS melalui sidang munakasah secara daring oleh Program Studi Hukum Keluarga dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat kelulusan “Sangat Memuaskan”.